

**SISTEM MANAJEMEN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA(SMK3)
PADA PT.PERTAMINA (PERSERO) TERMINAL BBM KIJANG**

NASKAH PUBLIKASI



OLEH

**SYAMSUDIN LANGO KUKUN
NIM : 110563201101**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TANJUNGPINANG
2015**

ABSTRAK

SYAMSUDIN LANGO KUKUN

AGUS HENDRAYADY

RAMADHANI SETIAWAN

Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara, FISP, UMRAH, syamsudinkukun@gmail.com

Pada Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM Kijang. Menurut Ramli (2010:46) mengatakan bahwa SMK3 merupakan konsep pengelolaan K3 secara sistematis dan komprehensif dalam suatu sistem manajemen yang utuh melalui proses perencanaan, penerapan, pengukuran dan pengawasan. tujuan dari Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) adalah memberi perlindungan kepada pekerja. Bagaimanapun, pekerja adalah asset perusahaan yang harus dipelihara dan dijaga keselamatannya. Pengaruh positif terbesar yang dapat diraih adalah mengurangi angka kecelakaan kerja. Dengan menerapkan sistem ini, kita dapat mencegah terjadinya kecelakaan, kerusakan atau sakit akibat kerja. Dengan demikian kita tidak perlu mengeluarkan biaya yang ditimbulkan akibat kejadian tersebut. Salah satu biaya yang dapat dikurangi dengan menjalankan SMK3 adalah biaya premi asuransi. Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan No. 1 tahun 1970 mengenai keselamatan kerja, dituliskan setiap aktivitas pekerjaan yang memiliki potensi bahaya dan resiko harus dan wajib untuk menjalankan SMK3 di dalamnya.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian deskriptif pendekatan kualitatif. Penelitian ini untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai SMK3 Pada PT.Pertamina (Persero) Terminal BBM Kijang.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa di PT.Pertamina (Persero) Terminal BBM Kijang telah menerapkan SMK3 berdasarkan SOP yang ada, dan telah mampu meraih dan mempertahankan *zero accident* selama 3 tahun terakhir.

Kata Kunci: Sistem, Manajemen, Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

ABSTRACT

SYAMSUDIN LANGO KUKUN
AGUS HENDRAYADY
RAMADHANI SETIAWAN

Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara, FISP, UMRAH, syamsudinkukun@gmail.com

ABSTRACT

On This research aims to determine how the Occupational Safety and Health Management System (SMK3) PT. Pertamina (Persero) Fuel Terminal Kijang. According to Ramli (2010: 46) says that SMK3 K3 is the management concept systematically and comprehensively in a unified management system through the process of planning, implementation, measurement and monitoring. the purpose of the Occupational Safety and Health Management System (SMK3) is to provide protection to workers. However, the worker is a company asset that should be preserved and maintained safety. The biggest positive influences that can be achieved is to reduce the number of work accidents. By implementing this system, we can prevent accidents, damage or illness caused by work. Thus we do not need to spend costs incurred as a result of the incident proficiency level. One of the costs can be reduced by running SMK3 is the cost of insurance premiums. In accordance with Legislation No. 1 of 1970 concerning safety, any written work activities that have the potential dangers and risks and should be mandatory to run SMK3 in it.

This type of research used in this study is a qualitative research approach deskriptif. This research is to obtain a clear picture of SMK3 In PT.Pertamina (Persero) Fuel Terminal Kijang.

From this research it can be concluded that in PT.Pertamina (Persero) Fuel Terminal Kijang has implemented SMK3 based on existing SOPs, and has been able to achieve and maintain a zero accident during the last 3 years.

Keywords: *Systems, Management, Occupational Health and Safety.*

**SISTEM MANAJEMEN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA(SMK3)
PADA PT.PERTAMINA (PERSERO) TERMINAL BBM KIJANG**

PENDAHULUAN

I.I Latar Belakang

Perilaku organisasi yang dilakukan oleh setiap para pelaku organisasi yang dalam hal ini manusia, yang selanjutnya merupakan faktor inti dari berkumpulnya setiap manusia guna saling untuk berinteraksi dalam satu komunitas, wadah atau institusi tertentu yang pada akhirnya membawa individu kedalam tatanan organisasi dalam membina dan membentuk kemampuan, kepercayaan pribadi, mengharapkan kebutuhan, dan pengalaman masa lalunya.

Organisasi yang juga merupakan suatu lingkungan bagi individu mempunyai karakteristik, sebagaimana yang dikemukakan oleh Toha dalam Alfiandri (2008;1) yaitu ia mengatakan bahwa adapun karakteristik yang dipunyai organisasi antaranya adalah keteraturan yang diwujudkan dalam susunan hierarki, pekerjaan-pekerjaan, tugas-tugas, wewenang dan tanggung jawab, sistem penggajian (*reward system*), sistem pengendalian dan lain sebagainya.

Sebagai suatu wadah maka organisasi akan selalu melakukan aktivitas-aktivitas yang bertujuan mencapai tujuan

dari rencana organisasi yang telah ditetapkan dan ditentukan agar dapat tercapainya suatu tingkat hasil organisasi yang efektif maupun efisien, sebagaimana yang dikemukakan oleh Siagian dalam Alfiandri (2008;2) dalam teori organisasinya bahwa:

“Organisasi ialah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan mana terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan.”

Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa organisasi merupakan suatu wadah dan alat untuk berproses dalam mencapai tujuan individu maupun tujuan kelompok. Didalam organisasi inilah setiap individu juga melaksanakan proses kerjasama untuk mencapai suatu tujuan tertentu, namun demikian berbagai macam bentuk hambatan pasti akan ditemui dan merupakan suatu masalah yang dihadapi oleh manusia itu. Karena itulah dalam setiap usaha kerjasama diperlukan seorang pemimpin untuk mengomandoi demi pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh organisasi tersebut.

Tujuan utama dibentuknya organisasi keselamatan kerja ialah untuk mengurangi tingkat kecelakaan, sakit, cacat dan kematian akibat kerja, dengan lingkungan kerja yang sehat, bersih, aman dan nyaman. Organisasi bisa dibentuk di tingkat pemerintah, perusahaan atau oleh kelompok atau serikat pekerja. Di Amerika, organisasi keselamatan kerja bagi pekerja swasta dibentuk dibawah OSHA (*Occupational Safety and Healthy Administration*) OSHA membuat peraturan yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Organisasi ini terdiri dari 4 bagian: Bagian Perencanaan, Operasi, Logistik dan bagian keuangan. Personal organisasi bisa terdiri dari pemerintah, kepolisian, dokter, psikolog, tenaga ahli teknik, ahli jiwa, dan sebagainya. Di Indonesia, organisasi pemerintah yang menangani masalah keselamatan kerja di tingkat pusat dibentuk di bawah Direktorat Pembinaan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja. (Siregar,2012; <https://roysarimilda.wordpress.com/tag/organisasi-kerja/>).

SMK3 sering dianggap sebagai penghambat proses produksi, dan dianggap sebagai program penuh dengan *cost* atau biaya. Kebanyakan dari perusahaan yang berpikiran seperti itu, tidak memahami SMK3 yang sebenarnya itu sangat mudah dilaksanakan. SMK3 itu tidak memakan *cost* atau biaya. SMK3 itu sebagai bentuk perlindungan bagi karyawan dalam menjalankan pekerjaan sehingga karyawan akan tenang dalam bekerja, dan mampu

meningkatkan produktivitas. (Jamaludin,2011; [https:// budayak3.wordpress.com /2011/05/05/ langkah- tepat- implementasi-sistem- manajemen-k3 -di- perusahaan/](https://budayak3.wordpress.com/2011/05/05/langkah-tepat-implementasi-sistem-manajemen-k3-di-perusahaan/)).

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) adalah memberi perlindungan kepada pekerja sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya yang ditimbulkan akibat kecelakaan kerja. Salah satu biaya yang dapat dikurangi dengan menjalankan SMK3 adalah biaya premi asuransi. (Simanjuntak,2013; [http:// digilib.its.ac.id/ public/ITS-Undergraduate- 14893- presentationpdf.pdf](http://digilib.its.ac.id/public/ITS-Undergraduate-14893-presentationpdf.pdf)).

Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan No. 1 tahun 1970 mengenai keselamatan kerja, dituliskan setiap aktivitas pekerjaan yang memiliki potensi bahaya dan resiko harus dan wajib untuk menjalankan SMK3 di dalamnya. Undang-Undang nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan menjelaskan bahwa setiap tempat kerja harus melaksanakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja, agar tidak terjadi gangguan kesehatan pada pekerja, keluarga, masyarakat dan lingkungan disekitarnya. Secara normatif sebagaimana terdapat pada PER.05/MEN/1996 pasal 1, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) adalah bagian dari sistem manajemen keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan

keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif (Belang,2013; <http://raiarisa.blogspot.com/2013/01/smk3-dan-p2k3.html>).

Pada penelitian ini ada beberapa fenomena pelaksanaan SMK3 pada PT.Pertamina (Persero) Terminal BBM Kijang:

- a. Pelaksanaan SMK3.
PT.Pertamina (Persero) Terminal Bahan Bakar Minyak yang terletak salah satunya di daerah Kijang Kabupaten Bintan, yang merupakan perusahaan yang memasok BBM untuk memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya di Bintan dan sekitarnya sehingga sangat diharapkan dapat memberikan pelayanan yang baik dan dapat memasok BBM hingga ke pelosok-pelosok desa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun dengan demikian, seperti yang kita ketahui bersama bahwa dilingkungan kerja perusahaan PT.Pertamina sangat rawan dengan bahaya kebakaran dan bahaya kerja lainnya sehingga dapat merugikan pihak perusahaan, karyawan dan lingkungan sekitar perusahaan itu sendiri.
- b. Masalah yang dihadapi.
Sistem tersebut dilihat sebagai sebuah momok, karena ketidaktahuan yang besar dalam membentuk sebuah SMK3 di perusahaan. *Awareness* (kepedulian),

alat-alat dan media sosialisasi sangat minim.

- c. Bantuan dari manajemen pusat dan cabang.
Penyuluhan atau seminar peningkatan kepedulian (*awareness*), pengadaan alat bantu sosialisasi.

Berdasarkan latar belakang dinamika yang terjadi pada saat ini, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Pada PT.Pertamina (Persero) Terminal BBM Kijang”**.

1.2 Perumusan Masalah

Mengacu pada uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang disampaikan dalam penelitian ini adalah :

“Bagaimanakah Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Pada PT.Pertamina (Persero) Terminal BBM Kijang? ”

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk :
“Untuk mengetahui Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Pada PT.Pertamina (Persero) Terminal BBM Kijang”.
2. Kegunaan Penelitian

Bagi pengembangan ilmu, penelitian ini diharapkan dapat :

1. Menambah pengetahuan tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), sehingga dapat menjadi referensi bagi peneliti yang melakukan penelitian sejenis atau penelitian lanjut di kemudian hari.
2. Menjelaskan bagaimana seharusnya Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dengan baik.

Bagi **aspek gunalaksananya**, penelitian ini diharapkan dapat :

1. Mengidentifikasi kelemahan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Pada PT.Pertamina (Persero) Terminal BBM Kijang.
2. Memberikan sumbangan pikiran terhadap usaha – usaha untuk memperbaiki Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Pada PT.Pertamina (Persero) Terminal BBM Kijang.

Bagi **peneliti**, penelitian ini diharapkan dapat :

1. Menambah wawasan.
2. Mengembangkan dan mempraktekkan teori-teori yang selama ini didapat saat perkuliahan pada jenjang strata 1 (satu).

1.4 KonsepTeori

1.4.1 Sistem

Menurut O'brien mengatakan bahwa Sistem adalah sekelompok komponen

yang saling berhubungan, bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dengan menerima input serta menghasilkan output dalam transformasi yang teratur. Sedangkan menurut Manama Sistem adalah sebuah struktur konseptual yang tersusun dari fungsi-fungsi yang saling berhubungan yang bekerja sebagai suatu kesatuan organik untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan secara efektif dan efisien. (Dalam Sasrawan,2014;

<http://hedisasrawan.blogspot.com/2014/01/25-pengertian-sistem-menurut-para-ahli.html>).

1.4.2 Manajemen

Menurut Ogawa Manajemen adalah Perencanaan, Pengimplementasian dan Pengendalian kegiatan-kegiatan termasuk sistem pembuatan barang yang dilakukan oleh organisasi usaha dengan terlebih dahulu telah menetapkan sasaran-sasaran untuk kerja yang dapat disempurnakan sesuai dengan kondisi lingkungan yang berubah. Sedangkan menurut Stoner mengatakan bahwa Manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya dari anggota organisasi serta penggunaan semua sumber daya yang ada pada organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. (Dalam Lokas,2013; <http://www.slideshare.net/ChristianYLokas/30-definisi-manajemen-menurut-para-ahli-27861205>).

Menurut Gaol (2014:38) mengatakan bahwa, manajemen adalah

proses kerja sama antara dua orang atau lebih dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Menurut Mathis dan Jackson (2006:67) mengemukakan bahwa, manajemen yang efektif menentukan arah yang harus dituju organisasi, bagaimana cara untuk menuju kesana, dan kemudian mengadakan evaluasi secara rutin untuk melihat apakah organisasi telah berada di jalur yang benar.

Sementara itu menurut Sofo (1999:272) mengatakan bahwa, empat tahapan kunci dari proses manajemen kinerja secara umum proses manajemen bersifat siklus, dimana manajer dan pekerja bekerja sama pada seluruh tahapan. Empat tahapan tersebut adalah, perencanaan kinerja, pelatihan dan umpan balik, pengkajian dan pengembangan serta penghargaan.

Tantangan-tantangan organisasional merupakan problem internal bagi perusahaan. bentuk-bentuk tantangan organisasional yang sangat kental dengan perubahan lingkungan eksternal antara lain kebutuhan untuk mempertahankan atau memperkuat posisi persaingan, *problem downsizing*, restrukturisasi, penciptaan budaya organisasi yang inovatif dan fleksibilitas. Selain daripada itu, menurut Gaspersz (2007:29) mengatakan bahwa, akar penyebab kegagalan implementasi sistem-sistem manajemen kinerja pada perusahaan-perusahaan di Indonesia adalah karena kelemahan dalam pendekatan manajemen yang tidak atau belum melakukan peningkatan kinerja secara sistematis

melalui perencanaan, implementasi, pengendalian dan peningkatan kinerja dalam kerangka *master improvement Story* perusahaan.

1.4.3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Menurut Gaol (2014:771) mengatakan bahwa, program-program keselamatan dan kesehatan kerja akan membantu untuk memelihara kondisi fisik karyawan, sementara program pelayanan karyawan akan membantu memelihara sikap para karyawan.

K3 dibagi menjadi 2 pengertian, yaitu:

- a. Secara Filosofis
Suatu pemikiran atau upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani, tenaga kerja pada khususnya dan masyarakat pada umumnya terhadap hasil karya dan budayanya menuju masyarakat adil dan makmur.
- b. Secara Keilmuan
Ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

Tujuan dari K3:

1. Melindungi kesehatan, keamanan dan keselamatan dari tenaga kerja.
2. Meningkatkan efisiensi kerja.
3. Mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

Undang-undang yang mengatur K3:

- a. Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
Undang-Undang ini mengatur dengan jelas tentang kewajiban pimpinan tempat kerja dan pekerja dalam melaksanakan keselamatan kerja.
- b. Undang-undang nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan.
- c. Undang- Undang ini menyatakan bahwa secara khusus perusahaan berkewajiban memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik pekerja yang baru maupun yang akan dipindahkan ke tempat kerja baru, sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan kepada pekerja, serta pemeriksaan kesehatan secara berkala.
- d. Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang ini mengatur mengenai segala hal yang berhubungan dengan ketenagakerjaan mulai dari upah kerja, jam kerja, hak maternal, cuti sampai dengan keselamatan dan kesehatan kerja. (Borneo,2014 ; <http://mgunturborneo.blogspot.com/2014/01/pengertian-tujuan-dan-undang-undang.html>).

1.4.4 Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia

Menurut Notoatmodjo (2003:117) mengatakan bahwa, manajemen sumber daya manusia adalah penarikan (rekrutmen), seleksi, pengembangan, pemeliharaan dan penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan-tujuan

individu maupun organisasi”. Sedangkan pendapat Hedvard dalam Sedarmayanti (2007:13), memperluas konsep dengan menekan kegunaan komitmen dan mutualitas, yaitu model manajemen sumber daya manusia yang baru disusun oleh kebijakan yang mempromosikan mutualitas tujuan bersama, pengaruh bersama, penghargaan bersama, imbalan bersama dan tanggung jawab bersama.

Menurut Umar (2001:3) mengatakan bahwa Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan bagian dari manajemen keorganisasian yang memfokuskan diri pada unsur sumber daya manusia. Sedangkan tujuan dari manajemen sumber daya manusia menurut Martoyo (2007:12) dapat dirinci menjadi 4 (empat) tujuan utama yaitu, tujuan organisasional, tujuan fungsional, tujuan sosial dan tujuan personal. Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) yang strategis hubungan MSDM dengan sasaran dan tujuan strategis untuk meningkatkan prestasi bisnis dan mengembangkan budaya organisasi yang membantu pengembangan inovasi dan fleksibilitas.

1.4.5 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

Menurut Ramli (2010:50) mengatakan bahwa, SMK3 merupakan konsep pengelolaan K3 secara sistematis dan komprehensif dalam suatu sistem manajemen yang utuh melalui proses

perencanaan, penerapan, pengukuran dan pengawasan. SMK3 terdiri atas 2

Prinsip SMK3 sesuai dengan standar OHSAS 18001:2008. Standar OHSAS 18001:2008 didasarkan pada metodologi yang dikenal sebagai *Plan-Do-Check-Act* (PDCA). *Plan* berupa penetapan sasaran dan proses yang diperlukan untuk mencapai hasil sesuai dengan kebijakan SMK3 organisasi. *Do* melaksanakan proses *Check* berupa memantau dan mengukur kegiatan proses terhadap kebijakan, sasaran, peraturan perundang-undangan dan persyaratan SMK3 lainnya serta melaporkan hasilnya. *Act* yakni mengambil tindakan untuk perbaikan kinerja SMK3 secara berkelanjutan. (Dalam Susihono dan Rini,2013:214).

Menurut Sedarmayanti (dalam Nur 2012:20) mengatakan, dalam penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, organisasi wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

- a. Menetapkan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dan menjamin komitmen terhadap penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.
- b. Merencanakan pemenuhan kebijakan tujuan dan sasaran penerapan keselamatan dan kesehatan kerja.
- c. Menerapkan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja secara efektif dengan

mengembangkan kemampuan dan mekanisme pendukung yang diperlukan mencapai kebijakan, tujuan, sasaran, keselamatan dan kesehatan kerja.

- d. Mengukur, memantau, dan mengevaluasi kinerja keselamatan dan kesehatan kerja serta melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan.
- e. Meninjau secara teratur dan meningkatkan pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja secara berkesinambungan dengan tujuan meningkatkan kinerja keselamatan dan kesehatan kerja”.

Menurut Widodo (2015:248) mengatakan bahwa, memiliki Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang terintegrasi ini, sudah merupakan suatu keharusan untuk sebuah perusahaan dan telah menjadi peraturan terutama pada proyek konstruksi.

1.5 Konsep Operasional

Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) merupakan instrumen yang memproteksi pekerja, perusahaan, lingkungan hidup, dan masyarakat sekitar dari bahaya akibat kecelakaan kerja. Perlindungan tersebut merupakan hak asasi yang wajib dipenuhi oleh perusahaan. SMK3 bertujuan mencegah, mengurangi, bahkan menihilkan

resiko kecelakaan kerja akibat (*zero accident*). Penerapan konsep ini tidak boleh dianggap sebagai upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang menghabiskan banyak biaya (*cost*) perusahaan, melainkan harus dianggap sebagai bentuk investasi jangka panjang yang memberi keuntungan yang berlimpah pada masa

Dalam menetapkan tujuan dan sasaran SMK3 perusahaan harus menggunakan indikator kinerja yang dapat diukur sebagai dasar penilaian kinerja SMK3 yang sekaligus merupakan informasi mengenai keberhasilan pencapaian SMK3. Dengan adanya indikator kinerja maka akan dihasilkan suatu sasaran SMK3 yang khusus, dimana sasaran tersebut dapat diukur, dicapai, sesuai dengan kenyataannya sertam emiliki jangka waktu pencapaiannya. Misalnya :

Tujuan : SMK3

Sasaran : SMK3 secara penuh dalam waktu enam bulan Indikator: % unit kerja yang memenuhi kriteria

Sasaran khusus: Seluruh unit kerja dalam perusahaan memenuhi seluruh kriteria audit SMK3 dalam waktu 6 bulan.

Tujuan

: Mengurangi cedera akibat penanganan manual di gudang

Sasaran

: Pengurangan cedera sebesar 50% dari data tahun lalu

Indikator : % jumlah cedera akibat penanganan manual

Sasaran khusus: Mengurangi jumlah cedera akibat penanganan manual di gudang sebesar 50% dari data cedera tahun lalu.

Beberapa indikator SMK3 yang dapat digunakan yaitu:

1. Dimensi Negatif

Indikatornya adalah:

- a. Kecelakaan kerja
- b. Kasus penyakit akibat kerja
- c. Laporan pelanggaran SMK3
- d. Ketidaksiesuaian pelaksanaan SMK3

2. Dimensi Positif

Indikatornya adalah:

- a. Penyelesaian suatu program kerja.
- b. Pelatihan yang terlaksana.
- c. Penyelesaian tindakan pengendalian risiko.
- d. Hasil pengukuran lingkungan kerja.
- e. Pemakaian alat pelindung diri.
- f. Alat SMK3 yang tersedia.
- g. Tingkat kepuasan karyawan akan pelaksanaan SMK3.(Firmanto,2013; <http://k3lengkap.blogspot.com/2013/01/indikator-kinerja-smk3-perusahaan.html>).

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian deskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan kualitatif.

Penelitian ini untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada PT.Pertamina (Persero) Terminal BBM Kijang.

1.6.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini pada PT.Pertamina (Persero) Terminal BBM Kijang. Alasan penulis mengambil penelitian disini adalah:

- a. Lokasi Kantor PT.Pertamina (Persero) Terminal BBM Kijang, yang merupakan salah satu perusahaan pemasok bahan bakar minyak yang rawan dengan bahaya kebakaran dan kecelakaan kerja, hal ini tentu akan menimbulkan permasalahan bagi seluruh pegawai dan juga berdampak pada lingkungan sekitarnya.
- b. Sepanjang pengetahuan peneliti, belum pernah dilakukan penelitian terhadap permasalahan yang sama dengan yang dibuat peneliti ini.

1.6.3 Informan

Menurut Sugiyono (2013:216) dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang

dipelajari. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai nara sumber, atau partisipan, informan, teman dan guru dalam penelitian. Sampel dalam penelitian kualitatif, juga bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis, karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori.

1.6.4 Jenis dan Sumber Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan maka dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian yang mengenakan alat ukur atau pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari yaitu studi lapangan. Biasanya berupa pengumpulan data yang diperoleh melalui penelitian dengan turun ke lokasi penelitian untuk mencari fakta yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari pihak lain tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya yaitu studi ke pustaka. Biasanya berupa teknik pengumpulan data atau informasi yang menyangkut masalah yang diteliti dengan mempelajari dari menelaah buku, surat kabar atau bentuk-bentuk tulisan lainnya yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.

1.6.5 Teknik dan Alat Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

Yaitu pencarian referensi melalui penelusuran literatur dan sumber-sumber informasi valid lainnya yang digunakan sebagai pelengkap dan perbandingan data yang telah diperoleh serta mencari alternatif pemecahan masalah yang ditemukan di lapangan.

b. Observasi

Observasi atau pengamatan langsung merupakan salah satu teknik pengumpulan data dimana peneliti terjun langsung sebagai partisipan atau non partisipan. Dengan teknik observasi peneliti dapat memperoleh gambaran langsung dan mengetahui keadaan yang sesungguhnya terjadi dilapangan. Alat yang digunakan dalam Observasi adalah *Chek List* (daftar periksa) dan kamera.

c. Wawancara (*Interview*)

Wawancara yang dilakukan secara langsung ditujukan kepada *Operation Head* dan JR SPV MS & HSE PT.Pertamina (Persero) Terminal BBM Kijang, serta pegawai dan karyawan lapangan, dengan menggunakan alat daftar pertanyaan.

1.6.6 Teknik Analisa Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis secara kualitatif dengan menggunakan model analisis interaktif. Miles dan Huberman

dalam Sugiyono (2003:246), mengemukakan bahwa “ aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh”. Aktifitas dalam analisa data, yaitu :

1. Reduksi Data (*Pemilahan/Sortir*)

Merupakan bagian dari proses analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga dapat membuat kesimpulan akhir.

2. Sajian Data

Merupakan suatu rakitan organisasi informasi, deskriptif dalam bentuk narasi yang Buku Pedoman penulisan Usulan Penelitian & Skripsi Mahasiswa FISIP

40 memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Sajian data harus mengacu pada rumusan masalah sehingga dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang diteliti.

3. Penarikan Kesimpulan

Dari awal pengumpulan data, peneliti harus sudah memahami apa arti dari berbagai hal yang ditemui dengan melakukan pencatatan peraturan-peraturan, pola-pola, pernyataan-pernyataan, arahan, sebab-akibat dan berbagai proporsi, kesimpulan perlu diverifikasi agar penelitian yang dilakukan benar dan bisa dipertahankan.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hakikat Penelitian

Dalam penelitian ini paradigma yang berkaitan dengan penelitian ini adalah paradigma ke-5, yang mana adalah teori organisasi yang selama dua setengah dasawarsa terakhir memusatkan perhatian tentang bagaimana dan mengapa organisasi bekerja, bagaimana perilaku orang-orang di dalamnya dan mengapa demikian, serta bagaimana dan mengapa keputusan di buat. Para ahli Administrasi Negara semakin banyak memberi perhatian pada bidang ilmu lain yang memang tak terpisahkan dari Administrasi Negara seperti Ilmu Politik, Ekonomi Politik, proses pembuatan kebijakan negara, serta analisisnya, dan perkiraan pengeluaran (output) kebijakan. Dengan demikian kita membahas Administrasi Negara dalam konteks paradigma yang tengah berlaku sekarang: fokusnya adalah teori organisasi dan ilmu manajemen, sedangkan lokusnya adalah kepentingan umum dan urusan umum.

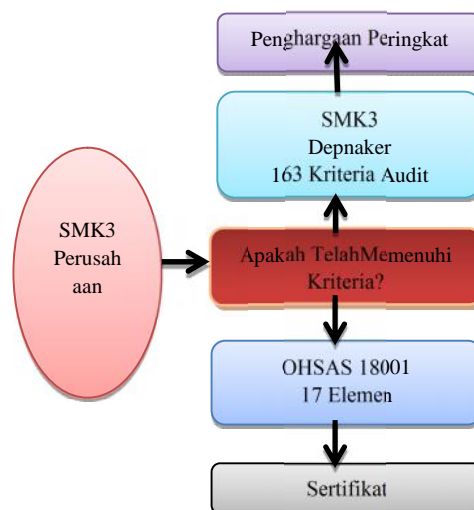
2.2 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

Menurut Ramli (2010:46) mengatakan bahwa SMK3 merupakan konsep pengelolaan K3 secara sistematis dan komprehensif dalam suatu sistem manajemen yang utuh melalui proses perencanaan, penerapan, pengukuran dan pengawasan.

Sedangkan menurut Ramli (2010:48) yang mengatakan bahwa tujuan SMK3 dapat digolongkan sebagai alat ukur K3 dalam organisasi, sebagai pedoman implementasi K3 dalam organisasi, sebagai dasar penghargaan (*awards*) dan sebagai sertifikasi. Mengingat banyaknya SMK3 yang dikembangkan oleh berbagai institusi tersebut, timbul kebutuhan untuk menstandarisasikan sekaligus memberikan sertifikasi atas pencapaiannya. Sistem ini dapat disertifikasikan melalui lembaga sertifikasi dan diakui secara global OHSAS 18001 pertama kali diperkenalkan pada tahun 1999 dan kemudian disempurnakan pada tahun 2007. Hubungan antara SMK3 (Depnaker) dengan SMK3-OHSAS 18001 dapat dilihat dalam skema berikut ini:

Gambar 2.1

Pola Penerapan SMK3



Menurut Ramli (2010:50) mengatakan bahwa proses SMK3 menggunakan pendekatan PDCA (*Plan-do-check-action*) yaitu mulai dari perencanaan,

penerapan, pemeriksaan dan tindakan perbaikan dengan demikian SMK3 akan berjalan terus menerus secara berkelanjutan selama aktivitas organisasi masih berlangsung, maka dapat dilihat pada gambar berikut:

2.3 SMK3 dan OHSAS 18001

Secara umum OHSAS 18001 dapat digunakan bagi setiap organisasi yang ingin:

- a. Mengembangkan suatu SMK3 untuk menghilangkan atau mengurangi resiko terhadap individu atau pihak terkait lainnya yang kemungkinan terpajan oleh aktivitas organisasi.
- b. Menerapkan, memelihara atau meningkatkan SMK3
- c. Memastikan bahwa kebijakan K3 telah terpenuhi.
- d. Menunjukkan kesesuaian organisasi dengan standar SMK3 dengan cara:
 1. Pernyataan sendiri bahwa organisasi telah memenuhi standar SMK3.
 2. Memperoleh konfirmasi kesesuaian SMK3 oleh pihak ketiga yang memiliki kepentingan dengan organisasi seperti pelanggan dan pemasok.
 3. Mendapatkan konfirmasi tentang pernyataan sendiri oleh pihak eksternal organisasi.

4. Memperoleh sertifikasi/registrasi SMK3 oleh badan sertifikasi.

2.4 Manajemen Resiko

Menurut Ramli (2010:81) mengatakan bahwa, manajemen resiko merupakan elemen sentral dari manajemen K3 yang diibaratkan sebagai mata uang dengan dua sisi. Manajemen resiko memberikan warna dan arah terhadap penerapan dan pengembangan SMK3. Jika tidak ada bahaya dan tidak ada resiko, maka upaya K3 tentu tidak diperlukan dan sebaliknya manajemen K3 diperlukan sebagai antisipasi terhadap adanya bahaya dan resiko. Oleh karena itu, sebelum mengembangkan program K3 terlebih dahulu harus diketahui apa saja resiko dan potensi bahaya yang terdapat dalam kegiatan organisasi. Selanjutnya dikembangkan program pengendalian resiko yang tepat melalui pendekatan sebagai berikut:

- a. Manusia (*human approach*).
- b. Teknis (*engineering*) seperti sarana, mesin peralatan atau material dan lingkungan kerja.
- b. Sistem dan prosedur, yang berkaitan dengan pengoperasian, cara kerja aman atau SMK3.
- c. Proses, misalnya proses secara kimia atau fisis.

Mengelola resiko harus dilakukan secara komprehensif melalui pendekatan

manajemen resiko sebagaimana terlihat dalam *Risks Management Standard AS/NZS 4360*, yang meliputi:

1. Penentuan konteks.
2. Identifikasi resiko.
3. Analisa resiko.
4. Evaluasi resiko.
5. Pengendalian resiko.
6. Komunikasi.
7. Pemantauan dan tinjauan ulang.

Menurut International Labour Organization (2013:85) Pengendalian risiko dapat dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

2.5 Undang-undang Terkait Tentang SMK3

Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan No. 1 tahun 1970 mengenai keselamatan kerja, dituliskan setiap aktivitas pekerjaan yang memiliki potensi bahaya dan resiko harus dan wajib untuk menjalankan SMK3 di dalamnya.

Undang-Undang nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan menjelaskan bahwa setiap tempat kerja harus melaksanakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja, agar tidak terjadi gangguan kesehatan pada pekerja, keluarga, masyarakat dan lingkungan disekitarnya.

Manfaat dari penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per 05.Men/96 adalah :

1. Bagi Perusahaan :

- a. Mengetahui pemenuhan perusahaan terhadap peraturan perundangan di bidang K3.
- b. Mendapatkan bahan umpan balik bagi tinjauan manajemen dalam rangka meningkatkan kinerja SMK3.
- c. Mengetahui efektifitas, efisiensi dan kesesuaian serta kekurangan dari penerapan SMK3.
- d. Mengetahui kinerja K3 di perusahaan.
- e. Meningkatkan image perusahaan yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing perusahaan.
- f. Meningkatkan kepedulian dan pengetahuan karyawan mengenai K3 yang juga akan meningkatkan produktifitas perusahaan.
- g. Terpantaunya bahaya dan resiko di perusahaan.
- h. Penanganan berkesinambungan terhadap resiko yang ada di perusahaan.
- i. Mencegah kerugian yang lebih besar kepada perusahaan.
- j. Pengakuan terhadap kinerja K3 di perusahaan atas pelaksanaan SMK3.

2. Bagi Pemerintah :

- a. Sebagai salah satu alat untuk melindungi hak karyawan di bidang K3.
- b. Meningkatkan mutu kehidupan bangsa dan image bangsa di forum internasional.

- c. Mengurangi angka kecelakaan kerja sekaligus akan meningkatkan produktifitas kerja atau nasional.
- d. Mengetahui tingkat penerapan terhadap peraturan perundangan.
- g. Tingkat kepuasan karyawan akan pelaksanaan SMK3. (<http://k3lengkap.blogspot.com/2013/01/indikator-kinerja-smk3-perusahaan.html>).

Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) merupakan instrumen yang memproteksi pekerja, perusahaan, lingkungan hidup, dan masyarakat sekitar dari bahaya akibat kecelakaan kerja. Perlindungan tersebut merupakan hak asasi yang wajib dipenuhi oleh perusahaan. SMK3 bertujuan mencegah, mengurangi, bahkan menihilkan resiko kecelakaan kerja akibat (*zero accident*). Menurut Firmanto; 2013, Beberapa indikator SMK3 yang dapat digunakan yaitu:

1. Dimensi Negatif

Indikatornya adalah:

- a. Kecelakaan kerja
- b. Kasus penyakit akibat kerja
- c. Laporan pelanggaran SMK3
- d. Ketidaksiesuaian pelaksanaan SMK3

2. Dimensi Positif

Indikatornya adalah:

- a. Penyelesaian suatu program kerja.
- b. Pelatihan yang terlaksana.
- c. Penyelesaian tindakan pengendalian resiko.
- d. Hasil pengukuran lingkungan kerja.
- e. Pemakaian alat pelindung diri.
- f. Alat SMK3 yang tersedia.

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

3.1 Sejarah Berdirinya PT.Pertamina (Persero) Terminal BBM Kijang

Terminal BBM Kijang adalah Terminal Penimbunan Bahan Bakar Minyak yang merupakan perluasan atau penambahan terhadap Terminal BBM yang sudah ada di Provinsi Kepulauan Riau (KEPRI), yang dibangun dalam rangkaian rencana pembangunan Terminal BBM Pertamina di wilayah Indonesia Bagian Barat. Dengan operasinya Terminal BBM Kijang maka diharapkan suplai dan Distribusi dalam rangka pengadaan Bahan Bakar Minyak di wilayah Propinsi Kepulauan Riau akan makin mantap dan terjamin kontinuitasnya, terutama di kepulauan Riau.

PT.Pertamina (Persero) Terminal BBM Kijang diresmikan oleh Bapak Direktur Utama Pertamina Bapak Faisal Abda'oe pada tanggal 12 Agustus 1997. Sebelum Terminal BBM Kijang beroperasi untuk mencukupi persediaan BBM Pulau Bintan dan sekitarnya, di *supply* langsung dari Instalasi Tanjung Uban UP.III dengan kantor Penjualan UPPDN-I Tanjungpinang sebagai pusat penyelesaian administrasi. Pada saat Terminal BBM

Kijang mulai beroperasi, kegiatan administrasi Kantor Penjualan UPDDN-I Tanjungpinang dihentikan dan disatukan dengan administrasi Terminal BBM Kijang dibawah pengawasan Instalasi Tanjung Uban.

Fungsi Depot Kijang sebagai *Sales point* dalam memenuhi kebutuhan BBM bagi masyarakat di Pulau Bintan dan sekitarnya, menggantikan Instalasi Tanjung Uban UP. III, berhubungan satu dan lain hal pengalihan tersebut belum terlaksana sepenuhnya. Pada Bulan September 2006 aneksasi ke Instalasi Tanjung Uban, selanjutnya pada tanggal 22 Nopember 2010 diresmikan Optimalisasi Operasional Terminal BBM Kijang oleh Bapak Direktur Pemasaran Bapak Djailani Sutomo.

3.2 Visi dan Misi Perusahaan

Visi: Menjadi Perusahaan Energi Nasional Kelas Dunia.

Untuk mewujudkan Visi Perseroan sebagai perusahaan kelas dunia, maka Perseroan sebagai perusahaan milik Negara turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, terutama di bidang penyelenggaraan usaha energi, yaitu energi baru dan terbarukan, minyak dan gas bumi baik di dalam maupun di luar negeri serta kegiatan lain yang terkait atau menunjang kegiatan usaha di bidang energi, yaitu energi baru dan terbarukan, minyak dan gas bumi tersebut serta pengembangan optimalisasi sumber daya

yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Misi: Menjalankan usaha minyak, gas, serta energi baru dan terbarukan secara terintegrasi, berdasarkan prinsip-prinsip komersial yang kuat.

Misi Perseroan menjalankan usaha inti minyak, gas, bahan bakar nabati serta kegiatan pengembangan, eksplorasi, produksi dan niaga energi baru dan terbarukan (*new and renewable energy*) secara terintegrasi.

SISTEM MANAJEMEN

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3) PADA PT.PERTAMINA (PERSERO) TERMINAL BBM KIJANG

Fungsi Depot Kijang sebagai *Sales point* dalam memenuhi kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi masyarakat di Pulau Bintan dan sekitarnya, dengan operasinya Terminal BBM Kijang maka diharapkan suplai dan Distribusi dalam rangka pengadaan Bahan Bakar Minyak di wilayah Propinsi Kepulauan Riau akan semakin mantap dan terjamin kontinuitasnya. Namun tidak terlepas dari semua itu, untuk menjalankan visi dan misi dari PT.Pertamina (Persero) Terminal BBM Kijang agar berjalan efektif dan efisien,

maka perlunya perhatian khusus dalam Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di Perusahaan tersebut agar semua pekerja yang ada di perusahaan tersebut dapat terhindar dari kecelakaan kerja atau sakit akibat dampak dari pekerjaannya.

Pada dasarnya SMK3 sangat penting dalam sebuah perusahaan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa dilingkungan kerja perusahaan PT.Pertamina (Persero) Terminal BBM Kijang sangat rawan dengan bahaya kebakaran dan bahaya kerja lainnya sehingga dapat merugikan pihak perusahaan, karyawan dan lingkungan sekitar perusahaan itu sendiri.

Dalam penelitian ini penulis hanya membahas tentang prestasi yang diperoleh oleh PT.Pertamina (Persero) TBBM Kijang dalam mencapai total *zero accident* di lokasi perusahaan yang sejak 3 tahun terakhir tidak pernah terjadi kecelakaan kerja. Adapun dalam proses penelitian, penulis telah memperoleh data-data yang diperlukan, yaitu berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara pada key informan serta hasil observasi.

4.1 Karakteristik Informan

Sebelum masuk kepada hasil penelitian yang penulis telah lakukan, terlebih dahulu penulis perlu menyampaikan identitas informan sebagai kelengkapan dari hasil penelitian. Informan dalam penelitian ini seperti yang telah penulis sebutkan

sebelumnya adalah 4 orang, yang mana keempat informan tersebut yang berada di Lokasi PT.Pertamina (Persero) TBBM Kijang beralamat di Jl.Sei.Walang Km.25 Kelurahan Kijang Kota Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau. Masing-masing informan dalam penelitian ini kemudian diberi status / kode informan sebagai berikut:

Tabel IV.1
Data Status / Kode Informan

No	Status / kode	Jabatan	Jumlah (Orang)	Keterangan
1	Key Informan	Operation Head PT.Pertamina (Persero) Terminal BBM Kijang	1	Sebagai Penanggung Jawab Secara Keseluruhan
2	Informan 1	JR SPV MS & HSE	1	Penanggung Jawab
3	Informan 2	Tenaga Kerja Terlama	1	Sebagai Saksi Perkembangan SMK3 di Lokasi Penelitian
4	Informan 3	Tenaga Kerja Terbaru	1	Kesan, Pandangannya Sejak Masuk Bekerja
Total			4	

Sumber: Data Primer 2015

Pada tabel IV.1 tersebut dapat dilihat bahwa masing-masing responden penelitian diberi kode *key informan* kemudian diikuti kode nomor masing-masing informan, hal ini penulis lakukan

agar penulis lebih mudah mengenali atau mengetahui bahkan mengingat masing-masing informan dan memudahkan penulis dalam menganalisis data.

1.1.1 Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel IV.2
Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Informan (orang)	Presentase (%)
1	Laki-laki	4	100
2	Perempuan	0	0
	Jumlah	4	100%

Sumber: Identitas Informan hasil wawancara 2015

Tabel IV.2 diatas dapat dilihat dan disimpulkan bahwa hasil wawancara peneliti di lapangan keempat informan, yakni key informan, informan 1 dan selanjutnya adalah kesemuanya berjenis kelamin laki-laki, tidak ada informan yang berjenis kelamin perempuan, dikarenakan peneliti dalam melakukan penelitian tersebut seluruh informan yang telah ditentukan kebetulan berjenis kelamin laki-laki.

1.1.2 Karakteristik Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel IV.3
Karakteristik Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)	Presentase (%)
1	Strata 1	1	25
2	Diploma	1	25
3	SMA	2	50
	Jumlah	4	100%

Sumber: Identitas informan hasil wawancara 2015.

Tabel IV.3 Karakteristik informan berdasarkan pendidikan menunjukkan bahwa informan yang berpendidikan strata satu (S.1) berjumlah 1 orang (25%), informan yang berpendidikan diploma berjumlah 1 orang (25%) dan informan yang berpendidikan SLTA berjumlah 2 orang (50%). Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara penelitian dilapangan dilihat dari jumlah tingkat pendidikan lebih banyak lulusan SLTA, dikarenakan kedua informan lulusan SLTA tersebut yaitu informan 2 dan informan 3 dengan jabatan masing-masing kedua informan tersebut adalah informan 2 sebagai *Health Safety & Environment (HSE)*, sedangkan informan 3 sebagai *administrationmaintenance service*, yang mana kedua jabatan tersebut diharuskan dijabat oleh seseorang minimal lulusan SLTA sederajat.

1.1.3 Karakteristik Informan Berdasarkan Umur atau Usia

Tabel IV.4
Karakteristik Informan Berdasarkan Umur atau Usia

No	Umur / Usia (Tahun)	Jumlah Informan (orang)	Presentase (%)
1	20 – 39	2	50
2	40 – 55	2	50
	Jumlah	4	100%

Sumber: Identitas Informan hasil wawancara 2015

Dari Tabel IV.4 dapat dilihat bahwa peneliti dalam melakukan penelitian dilapangan data yang diperoleh dari hasil wawancara mengenai karakteristik informan menurut umur/usia menunjukkan bahwa, jumlah informan yang berusia (20-39) sebanyak 2 informan (50%) dan jumlah informan yang berusia (40-55) sebanyak 2 informan (50%). Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia produktif. Menurut UU No. 13 tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Penduduk tergolong tenaga kerja jika penduduk tersebut telah memasuki usia produktif. Batas usia produktif yang berlaku di Indonesia adalah berumur 15 tahun – 64 tahun. Menurut pengertian ini, setiap orang yang mampu bekerja disebut sebagai tenaga kerja. (Wikipedia, 29 Juni 2015; https://id.wikipedia.org/wiki/Tenaga_kerja).

1.2 Analisis Data Sistem Manajemen Keselamatan dan kesehatan Kerja (SMK3) di PT.Pertamina (Persero) Terminal BBM Kijang.

PT.Pertamina (Persero) Terminal BBM Kijang, Sebagaimana fungsinya Depot Kijang menjadi *Sales point* dalam memenuhi kebutuhan BBM bagi masyarakat di Pulau Bintan dan sekitarnya. Bahan bakar minyak

yang terima dari kapal tanker kemudian di timbun di tanki-tanki yang sudah disiapkan dan difungsikan sebagaimana mestinya di areal lokasinya, kemudian akan *disupply* melalui truk-truk BBM yang sesuai orderannya setiap harinya. Tidak terlepas dari semua itu baik teknologi fasilitas yang ada dan terlebih khususnya adalah manusia atau tenaga kerja yang ada diperusahaan tersebut menjadi asset yang paling mendasar menjadi hal yang paling utama dalam menjalankan produktivitas perusahaan yang menjadi haknya yang harus dipenuhi, dijaga keselamatan dan kesehatannya agar terhindar dari kecelakaan kerja yang berdampak pada kerugian baik bagi korban, bagi perusahaan dan juga lingkungan disekitarnya. Penerapan SMK3 perusahaan Pertamina Terminal BBM Kijang sangat diharapkan agar serius dan sesuai ketentuan dan undang-undang yang berlaku, sebab implementasi SMK3 itu tidak memakan *cost* atau biaya.

Untuk menganalisis Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di PT.Pertamina (Persero) TBBM Kijang, penulis mengacu kepada teori indikator yang dikemukakan oleh Firmanto (2013) yaitu:

1. Kecelakaan kerja

Untuk menganalisis Kecelakaan Kerja penulis mengacu pada teori Sugandi (dalam Isfaniy, 2010; <https://tuloe.wordpress.com/2010/02/20/kecelekaan-kerja/>), yang mengatakan kecelakaan kerja (*accident*) adalah suatu kejadian atau

peristiwa yang tidak diinginkan yang merugikan terhadap manusia, merusak harta benda atau kerugian proses. Pertanyaan wawancara untuk mewakili indikator ini adalah:

a. Dalam 3 tahun terakhir pernahkah terjadi kecelakaan kerja?

Berdasarkan pengamatan langsung peneliti dapat diperkuat pula dengan komitmen perusahaan PT.Pertamina (Persero) TBBM Kijang dan semua pekerja sangat mematuhi aturan tentang *Health Safety & Environment* (HSE), dengan bukti sertifikat penghargaan yang diberikan oleh pihak perusahaan kepada seluruh pekerja yang mematuhi aturan tentang HSE. Menurut peneliti hal ini sangat penting dilakukan dalam melakukan pembukuan atau arsip dalam administrasi perusahaan, karena dapat dikatakan ini adalah sebuah prestasi besar bagi perusahaan tentang SMK3 dalam mempertahankan *zero accident* yang patut dihargai oleh semua pihak, khususnya partisipasi pemerintah setempat dan perusahaan Pertamina pusat dalam melakukan kontrol atau fungsi pengawasan instansi tersebut.

b. Jika ada kecelakaan kerja tersebut bagaimana tanggung jawab dari pihak PT.Pertamina (Persero) TBBM Kijang terhadap korban kecelakaan kerja?

Untuk menganalisis Tanggung jawab perusahaan terhadap korban kecelakaan kerja, peneliti mengacu pada UU No.13 tahun 2003 Pasal 86 yang menjelaskan bahwa:

1. Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:
 - a. Keselamatan dan kesehatan kerja.
 - b. Moral dan kesusilaan.
 - c. Perlakuan yang sama yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.
2. Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Dari penjelasan undang-undang dan jawaban para informan diatas maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa, kecelakaan kerja pastinya tidak diinginkan oleh setiap pekerja maupun pihak perusahaan karena dapat saling merugikan antara kedua belah pihak. Para pekerja mestinya harus bertanggung jawab dengan pekerjaannya, pihak perusahaan tentunya berkewajiban untuk

memberikan fasilitas yang memadahi untuk melindungi pekerjaanya. Jika sekalipun akan terjadi kecelakaan kerja tentunya tanggung jawab pihak perusahaan tentulah sangat diharapkan dapat memberikan tanggung jawab yang sepenuhnya kepada hak pekerjaanya sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang yang berlaku di negara ini. Bagaimanapun juga pekerja adalah asset perusahaan yang mana dalam hal ini menyangkut dengan HAM. Namun inti dari kesemua itu adalah pihak perusahaan dan pekerjaanya agar tidak saling merugikan, maka harus saling bertanggung jawab dengan tugas maupun kewajiban masing-masing.

2. Kasus penyakit akibat kerja

Untuk menganalisis kasus penyakit akibat kerja peneliti mengacu kepada teori Adzim (2013) yang mendefinisikan Penyakit Akibat Kerja (PAK) ialah gangguan kesehatan baik jasmani maupun rohani yang ditimbulkan ataupun diperparah karena aktivitas kerja atau kondisi yang berhubungan dengan pekerjaan. Beberapa contoh penyakit akibat kerja (PAK) antara lain : *silicosis* (karena paparan debu silica), *asbestosis* (karena paparan debu asbes), *low back pain* (karena pengangkutan manual), *white finger syndrom* (karena getaran mekanis pada alat kerja), dsb.

Beberapa faktor penyebab penyakit akibat kerja (PAK) antara lain

: Biologi (bakteri, virus jamur, binatang, tanaman) ; Kimia (bahan beracun dan berbahaya/radioaktif) ; Fisik (tekanan, suhu, kebisingan, cahaya) ; Biomekanik (postur, gerakan berulang, pengangkutan manual) ; Psikologi (stress, dsb). Untuk mencegah penyakit akibat kerja dapat dilakukan berbagai upaya antara lain :

- a. Pemeriksaan kesehatan berkala.
- b. Pemeriksaan kesehatan khusus.
- c. Pelayanan kesehatan.
- d. Penyediaan sarana dan prasarana serta perbaikan tempat kerja yang lebih nyaman. (<http://sistemmanajemenkeselamatankerja.blogspot.com/2013/10/penyakit-akibat-kerja-pak.html>).
Pertanyaan wawancara untuk mewakili indikator ini adalah:

1. Dalam 3 tahun terakhir berapa banyak korban yang menderita penyakit akibat kerja?

Berdasarkan pertanyaan tersebut seluruh informan sependapat menjawab “tidak”. (Hasil wawancara tanggal 28 Mei, 08 Juni dan 10 Juni 2015).

Dari jawaban hasil wawancara tersebut peneliti mengambil kesimpulan bahwa, selama 3 tahun terakhir tidak pernah terjadi penyakit akibat kerja di PT.Pertamina (Persero) Terminal BBM Kijang.

2. **Bagaimanakah langkah untuk mencegah penyakit akibat kerja?**

Untuk menganalisis langkah untuk mencegah penyakit akibat kerja, maka peneliti mengutip pada teori Hartantik (2014:327) yang mengatakan bahwa:

“...kesehatan yang ditunjukkan pada pemeliharaan dan mempertinggi derajat kesehatan tenaga kerja, dilakukan dengan mengatur pemberian pengobatan perawatan tenaga kerja yang sakit, mengatur persediaan tempat,cara-cara dan syarat-syarat yang memenuhi norma-norma hygiene perusahaan dan kesehatan kerja untuk mencegah penyakit umum”.

Berdasarkan hasil wawancara dilapangan, jawaban yang didapat dari informan 1, 2 dan informan 3 sependapat menjawab,“menggunakan masker untuk terhindar dari paparan uap”. (Hasil wawancara tanggal 08 dan tanggal 10 Juni 2015).

Berdasarkan jawaban informan 1,2 dan informan 3 tersebut maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa, langkah untuk mencegah untuk terhindar dari bahaya penyakit akibat kerja adalah salah satunya menggunakan masker untuk mengindari paparan uap minyak yang ada di Terminal BBM Kijang.

Pendapat berbeda yang dikemukakan oleh key informan yang mengatakan bahwa:

“Pematuhan penggunaan APD (Alat Pelindung Diri), contohnya masker dll. Sedangkan pendukung atau tambahan lain dari perusahaan memberikan minuman susu, makanan yang mengandung vitamin dan gizi, serta senam setiap hari Jum’at”. (Hasil wawancara 28 mei 2015).

Berdasarkan jawaban dari key informan tersebut maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa,pematuhan dalam penggunaan APD dan didukung dengan pihak perusahaan memberikan makanan dan minuman bergizi dan olah raga senam sebagai langkah penunjang untuk mencegah penyakit akibat kerja.

Mengacu dari teori diatas dan jawaban dari semua informan tersebut maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa, untuk mencegah penyakit intinya tergantung pada komitmen pada individu masing-masing untuk menjaga kesehatannya, karena setiap pekerjaan pasti ada resiko yang berdampak pada kesehatan dirinya. Jika para pekerja mematuhi untuk penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) dan selalu teliti dan ekstra wasapada pada saat bekerja dapat terhindar dari bahaya penyakit akibat kerja. Namun selain daripada itu adalah kewajiban perusahaan harus

selalu memberikan fasilitas yang memadahi dan menciptakan suasana kebersihan di lingkungan perusahaan untuk menjaga kesehatan para pekerjanya, seperti memberikan pelayanan kesehatan berupa pemeriksaan kesehatan secara berkala, asupan makanan ataupun minuman yang bergizi dan pemanasan senam sebelum melakukan pekerjaan dilakukan secara berkala.

3. Laporan pelanggaran SMK3

Untuk menganalisis laporan pelanggaran SMK3 peneliti mengacu pada teori Ramli (2010:158) yang mengatakan investigasi dan pelaporan, setiap kejadian darurat harus diinvestigasi dengan teliti untuk mengetahui penyebab sekaligus juga untuk mengetahui penyebab sekaligus untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan dalam proses penanggulangannya. Dari setiap kejadian dapat diketahui tingkat kesiapan individu, kondisi sarana, kelancaran komunikasi dan kecepatan gerak tenaga pendukung yang diperlukan. Hasil penanggulangan darurat harus dilaporkan kepada manajemen sebagai bahan evaluasi untuk peningkatannya. Pertanyaan wawancara untuk mewakili indikator ini adalah:

a. Apakah laporan pelanggaran SMK3 sudah sesuai dengan SOP?

Dari pertanyaan tersebut seluruh informan sependapat menjawab “sudah sesuai SOP”. (Hasil wawancara tanggal 28 Mei, tanggal 08 Juni dan 10 Juni 2015).

Dari jawaban seluruh informan tersebut maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa, dalam pembuatan laporan pelanggaran SMK3 di PT.Pertamina (Persero) TBBM Kijang sudah sesuai berdasarkan SOP yang telah ditentukan. Tugas pembuatan laporan ini adalah manajemen para ahli *Safety* yang bekerja secara profesional berdasarkan temuan atau realita yang terjadi di lokasi perusahaan.

b. Apa saja menjadi kendala dalam laporan SMK3?

Berdasarkan hasil wawancara dilapangan, jawaban yang didapat dari Informan 1, 2 dan informan 3 ternyata sependapat menjawab, “Kepedulian terhadap *unsafe condition*”. (Hasil wawancara 10 Juni 2015).

Dari jawaban informan 1, 2 dan informan 3 tersebut maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa kepedulian terhadap kondisi yang tidak aman (*unsafe condition*) menjadi kendala dalam laporan SMK3. Sebab

jika kesadaran atau kepedulian para pekerja terhadap kondisi yang tidak aman adalah salah satu penghambat yang utama, maka dalam hal ini sangat dibutuhkan kesadaran dan kepedulian yang tinggi bagi setiap individu atau para pekerja.

Pendapat berbeda yang dikemukakan oleh key informan yang mengatakan bahwa:

“Sejauh ini belum ada kendala dalam laporan SMK3, karena semua pekerjaan selalu berdasarkan SOP yang ada, namun dalam hal ini dibutuhkan komitmen keseriusan dan tanggung jawab secara profesionalitas dalam pembuatan laporan SMK3”. (Hasil wawancara 28 Mei 2015).

Berdasarkan jawaban dari key informan tersebut maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa, untuk menghindari kendala tersebut maka sangat dibutuhkan komitmen keseriusan dan tanggung jawab maupun profesionalitas dalam pembuatan laporan.

Dari hasil wawancara tersebut peneliti mengambil kesimpulan bahwa, dalam pembuatan laporan SMK3 di PT.Pertamina (Persero) TBBM Kijang berdasarkan SOP yang ada. Sangat dibutuhkan kesadaran atau kepedulian yang tinggi dari para pekerja terhadap kondisi yang tidak aman dilingkungan perusahaan untuk

memberikan laporan bagi setiap pekerja yang menemukan kondisi yang tidak aman tersebut. Selanjutnya adalah dibutuhkan komitmen keseriusan dan tanggung jawab maupun profesionalitas dalam pembuatan laporan bagi petugas manajemen K3.

4. Ketidaksuaian pelaksanaan SMK3

Untuk menganalisis ketidaksuaian pelaksanaan SMK3 maka peneliti mengacu pada teori Ramli (2010:172) yang mengatakan bahwa, ketidaksuaian dapat bersumber dari SMK3, kondisi fisik tempat kerja, individu, lingkungan dan faktor non teknis lainnya. Semua ketidaksuaian harus diidentifikasi dan evaluasi dan dikelompokkan misalnya menurut jenis, lokasi, kejadian atau keparahan yang ditimbulkannya. Dengan adanya data mengenai ketidaksuaian ini, manajemen akan memperoleh gambaran mengenai kondisi pelaksanaan K3 dalam organisasi sekaligus prioritas yang diperlukan untuk perbaikannya. Pertanyaan untuk mewakili indikator ini adalah:

a. Dalam pelaksanaan SMK3 apakah sudah sesuai dengan SOP yang ada?

Berdasarkan pertanyaan tersebut jawaban yang didapat dari seluruh informan sependapat mengatakan “sudah”. (Hasil wawancara tanggal 28 Mei, 08 Juni dan 10 Juni 2015).

Dari jawaban seluruh informan tersebut maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa, dalam pelaksanaan SMK3 di PT.Pertamina (Persero) TBBM Kijang sudah sesuai dengan SOP yang ada.

b. Apa saja yang menjadi kendala dalam implementasi SMK3?

Untuk menganalisis Kendala dalam implementasi SMK3 di PT.Pertamina (Persero) TBBM Kijang maka peneliti mengacu pada teori Ramli (2010:58) yang mengatakan bahwa, kunci keberhasilan penerapan SMK3 diperlukan faktor sebagai berikut:

- SMK3 harus komprehensif dan terintegrasi dengan seluruh langkah pengendalian yang dilakukan. Antara elemen implementasi dengan potensi bahaya atau resiko yang ada dalam organisasi harus sejalan. SMK3 disusun dengan pendekatan *risk based concept* sehingga tidak salah arah (*misguided*).
- SMK3 harus dijalankan dengan konsisten dalam operasi satu-satunya cara untuk mengendalikan resiko dalam organisasi. Semua program K3 atau kebijakan K3 yang diambil harus mengacu kepada SMK3 yang ada. Sebagai contoh, ketika organisasi akan melakukan proyek ekspansi fasilitas, maka

dikembangkan program K3 untuk proyek yang tetap mengacu kepada SMK3 yang sudah ada.

- SMK3 harus konsisten dengan hasil identifikasi bahaya dan penilaian resiko yang sudah dilakukan. Hal ini akan tercermin dalam penetapan objektif dan program kerja yang harus mengacu kepada potensi bahaya yang ada dalam organisasi.
- SMK3 harus mengandung elemen-elemen implementasi yang berlandaskan siklus proses manajemen (PDCA).
- Semua unsur atau individu yang terlibat dalam operasi harus memahami konsep dan implementasi SMK3.
- Adanya dukungan dan komitmen manajemen puncak dan seluruh elemen dalam organisasi untuk mencapai kinerja K3 terbaik.
- SMK3 harus terintegrasi dengan sistem manajemen lainnya yang ada dalam organisasi.

Berdasarkan pertanyaan diatas jawaban yang didapat dari Informan 1, 2 dan informan 3 sependapat mengatakan, “kepedulian pihak terkait”. (Hasil wawancara tanggal 08 Juni dan 10 Juni 2015).

Berdasarkan jawaban informan 1, 2 dan informan 3 tersebut maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa, kepedulian pihak terkait dalam

hal ini dimaksud adalah kepedulian atau kesadaran para pekerja sangat dibutuhkan dalam implementasi SMK3 di lingkungan perusahaan.

Pendapat yang sedikit berbeda yang dikemukakan oleh key informan yang mengatakan bahwa:

“Kesadaran dan kepedulian pada individu masing-masing akan pentingnya SMK3”. (hasil wawancara 28 Mei 2015).

Dari jawaban key informan tersebut maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa, kesadaran atau kepedulian masing-masing individu atau pekerja adalah suatu faktor utama yang menjadi kendala keberhasilan implementasi SMK3 di lingkungan perusahaan.

Dari teori maupun hasil wawancara tersebut maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa, kendala yang lebih mendasar adalah komitmen tentang kesadaran dan kepedulian tentang pentingnya SMK3 bagi para pekerjanya sendiri maupun pihak perusahaan. Selibuhnya adalah tergantung integritas, profesionalitas pada saat melakukan pekerjaan dalam pemahaman tentang hal-hal yang berkaitan dengan SMK3.

5. Penyelesaian suatu program kerja

Untuk menganalisis penyelesaian suatu program kerja penulis mengacu pada teori Ramli

(2010:118) yang mengatakan bahwa, organisasi harus menetapkan, menjalankan dan memelihara program untuk mencapai objektif. Program harus mencakup minimal: 1) Penentuan tanggung jawab dan wewenang untuk pencapaian objektif pada fungsi dan tingkatan yang relevan dalam organisasi. 2) Sarana dan jangka waktu yang dipakai untuk mencapai objektif. Program manajemen K3 harus ditinjau secara berkala dan terencana dan diubah jika perlu untuk memastikan bahwa objektif tercapai.

Pertanyaan wawancara untuk mewakili indikator ini adalah:

a. Dalam penyelesaian suatu program kerja apakah dilakukan secara profesional dan berkelanjutan?

Dari pertanyaan tersebut jawaban yang didapat dari seluruh informan sependapat menjawab, “Iya”. (Hasil wawancara tanggal 28 Mei, 08 Juni dan tanggal 10 Juni 2015).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa dalam penyelesaian suatu program kerja di PT.Pertamina (Persero) TBBM Kijang dilakukan secara profesional dan berkelanjutan.

b. Dalam penyelesaian program kerja apakah sudah efektif dan efisien sesuai dengan target dan harapan?

Dari pertanyaan tersebut jawaban yang didapat dari seluruh informan sependapat menjawab, “sudah”. (Hasil wawancara tanggal 28 Mei, 08 Juni dan 10 Juni 2015).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa, dalam penyelesaian program kerja di PT.Pertamina (Persero) TBBM Kijang sudah efektif dan efisien.

6. Pelatihan yang terlaksana

TBBM Kijang maka peneliti mengacu pada teori Ramli (2010:130) yang mengatakan bahwa, organisasi harus mengembangkan standar pelatihan bagi seluruh individu dilingkungannya. Sesuai dengan filosofi K3 dari IASP (*International Association Of Safety Professional*) pekerja harus dilatih mengenai K3. Pemahaman atau budaya K3 tidak datang dengan sendirinya, namun harus dibentuk melalui pelatihan dan pembinaan. Sebagai contoh, untuk mengemudi kendaraan bermotor di jalan raya tidak bisa sekedar otodidak, namun lebih efektif jika dilakukan melalui pendidikan mengemudi. Pelatihan dimaksud untuk meningkatkan *knowledge*, *Skill* dan

Attitut (KSA) sehingga harus dirancang sesuai atau spesifik dengan kebutuhan masing-masing pekerja. Pertanyaan wawancara untuk mewakili indikator ini adalah:

a. Pernahkah bapak/ibu mengikuti kegiatan pelatihan SMK3?

Dari pertanyaan tersebut jawaban yang didapat dari seluruh informan sependapat menjawab, “sudah”. (Hasil wawancara tanggal 28 Mei, 08 Juni dan 10 Juni 2015).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa, semua informan pernah mengikuti pelatihan SMK3.

b. Pentingkah kegiatan pelaksanaan pelatihan SMK3 rutin dilakukan?

Berdasarkan pertanyaan terbut jawaban yang didapat dari Informan 1, 2 dan informan 3 sependapat menjawab, “Penting, untuk menjaga kepedulian K3”. (Hasil wawancara tanggal 08 Juni dan 10 Juni 2015).

Berdasarkan jawaban dari informan 1, 2 dan informan 3 tersebut maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa, bagi para informan tersebut merasa sangat penting dengan kegiatan pelaksanaan pelatihan SMK3 jika rutin dilakukan guna untuk menjaga kepedulian K3.

Pendapat yang sedikit berbeda namun pada dasarnya sama tujuannya yang dikemukakan oleh key informan yang mengatakan bahwa:

“Sangat penting, untuk menjaga keselamatan dan kesehatan diri masing-masing pekerja”. (Hasil wawancara 28 Mei 2015).

Berdasarkan jawaban dari key informan tersebut maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa, bagi key informan kegiatan pelaksanaan pelatihan SMK3 sangat penting jika dilakukan secara rutin, guna untuk menjaga keselamatan dan kesehatan bagi masing-masing pekerja.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka peneliti menyimpulkan bahwa, kegiatan pelaksanaan pelatihan SMK3 sangat penting dilakukan secara rutin bagi seluruh pekerja yang ada di PT.Pertamina (Persero) Terminal BBM Kijang, diguna dapat menambah wawasan, pengetahuan maupun pengalaman tentang SMK3 untuk dapat diterapkan pada saat bekerja di perusahaan untuk mengantisipasi dampak segala kemungkinan buruk akan terjadi pada para pekerja maupun perusahaan itu sendiri.

7. Penyelesaian tindakan pengendalian resiko

Untuk menganalisis penyelesaian tindakan pengendalian resiko peneliti mengacu pada teori

Ramli (2010:102) yang mengatakan bahwa, pengendalian resiko dilakukan terhadap seluruh bahaya yang akan ditemukan dalam proses identifikasi bahaya dan mempertimbangkan peringkat resiko untuk menentukan prioritas dan cara pengendaliannya. Selanjutnya dalam menentukan pengendalian harus mempertimbangkan hirarki pengendalian mulai dari eliminasi, substitusi, pengendalian teknis, administratif dan terakhir penyediaan alat keselamatan yang disesuaikan dengan kondisi organisasi, ketersediaan biaya, biaya operasional, faktor manusia dan lingkungan. Pertanyaan wawancara untuk mewakili indikator ini adalah:

a. Apa yang bapak/ibu lakukan jika melihat rekan kerjanya tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) pada saat sedang bekerja?

Jawaban yang didapat adalah:

1. Informan 1: “Ditegur dan dihukum sesuai aturan”. (Hasil wawancara 10 Juni 2015).

Berdasarkan jawaban dari informan 1 tersebut maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa langkah yang dilakukan oleh informan 1 tersebut karena berdasarkan tugas dan tanggung jawab informan 1 sebagai *Supervisor Health Safety & Environment* (HSE) yang berwenang dalam hal ini.

2. Informan 2 dan informan 3 berpendapat mengatakan: “Ditegur dan diberikan sanksi”. (Hasil wawancara 10 Juni 2015).

Berdasarkan jawaban dari informan 2 dan informan 3 tersebut maka peneliti memberikan kesimpulan bahwa menegur adalah hal yang wajar bagi sebagai rekan kerja untuk patuh kepada aturan yang berlaku diperusahaan dan rasa peduli kepada rekan kerjanya untuk menghindari atau mengantisipasi kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Memberikan sanksi bukan wewenang dari informan 2 dan informan 3, disebabkan karena dalam hal ini yang berwenang dalam memberikan sanksi adalah pimpinan puncak.

3. Key informan: “Menegur untuk menghentikan pekerjaannya, lalu memberikan sanksi kepada yang melanggar”. (Hasil wawancara 28 Mei 2015).

Berdasarkan jawaban dari key informan tersebut maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa, tindakan yang dilakukan oleh key informan tersebut adalah langkah yang sangat bijaksana sebagai seorang pimpinan puncak terhadap bawahan untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja.

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka peneliti menyimpulkan

bahwa setiap pekerja yang tidak patuh dalam penggunaan APD pada saat bekerja harus ditegur dan diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku di perusahaan PT.Pertamina (Persero) TBBM Kijang.

b. Apa tindakan bapak/ibu ketika menemukan ada tanda-tanda bahaya di lokasi perusahaan?

Berdasarkan pertanyaan tersebut jawaban yang didapat dari Informan 1, 2 dan informan 3 menjawab, “Melapor kepada supervisor untuk diperbaiki”. (Hasil wawancara tanggal 08 dan tanggal 10 Juni 2015).

Berdasarkan jawaban dari informan 1, 2 dan informan 3 tersebut maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa setelah melihat hal tersebut para informan langsung melapor kepada *supervisor* atau kepada pihak yang bertanggung jawab dalam tindakan perbaikan.

Pendapat berbeda yang dikemukakan oleh key informan yang mengatakan bahwa:

“Mengisi kartu PATUH yang sudah disediakan tersebar di lapangan, dan sesegera mungkin memberitahukan orang disekitar dan memberi laporan kepada petugas yang bertanggung jawab dibidang tersebut, khususnya petugas safety”. (Hasil wawancara 28 Mei 2015).

Berdasarkan jawaban dari key informan tersebut maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa, langkah untuk mengatasi agar para pekerja dapat terhindar dari bahaya tersebut maka harus memberitahukan kepada orang yang berada disekitar lokasi tersebut, mengisi kartu PATUH yang sudah disediakan, selanjutnya melaporkan kepada pihak yang lebih bertanggung jawab dalam pengendalian pekerjaan tersebut maupun pengawasan dari petugas *safety* untuk mengatasi hal tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa, siapapun yang menemukan ada tanda-tanda bahaya di lokasi perusahaan maka harus sesegera mungkin memberitahukan kepada pekerja yang berada disekitar lokasi tersebut untuk waspada, selanjutnya mengisi kartu Pengamatan Aturan Utama HSE (PATUH), kemudian menghubungi petugas *safety* untuk menindaklanjuti penyelesaian jalan keluarnya. Kartu PATUH adalah kartu yang berukuran 11 x 8,5 cm yang sudah disediakan di beberapa titik lokasi perusahaan, dengan fungsi sebagai laporan jenis pengamatan penemuan tanda bahaya di lokasi perusahaan berupa memo. Kartu tersebut sebagai bentuk komitmen perusahaan PT.Pertamina (Persero) TBBM Kijang dan seluruh pekerjanya untuk wajib diisi apabila ada penemuan

tanda bahaya atau pelanggaran SMK3 di lokasi perusahaan.

8. Hasil pengukuran lingkungan Kerja

Untuk menganalisis hasil pengukuran lingkungan kerja maka peneliti mengacu pada teori Manuaba (dalam Widiastuti, 2009:1) yang mengatakan bahwa, ditempat kerja terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja seperti; faktor fisik, faktor kimia, faktor biologis dan faktor psikologis. Semua faktor tersebut akan menimbulkan gangguan terhadap suasana kerja dan berpengaruh terhadap kesehatan dan keselamatan kerja. bahwa lingkungan kerja yang nyaman sangat dibutuhkan oleh pekerja untuk dapat bekerja secara optimal dan produktif. Oleh karena itu lingkungan kerja harus ditangani dan di desain sedemikian rupa sehingga menjadi kondusif terhadap pekerja untuk melaksanakan kegiatan dalam suasana yang nyaman dan aman. ([http:// core.ac.uk/download/ pdf/ 12349032.pdf](http://core.ac.uk/download/pdf/12349032.pdf)). Pertanyaan wawancara untuk mewakili indikator ini adalah:

- a. Apakah pengukuran dan pemantauan aspek-aspek dampak lingkungan operasional perusahaan dilakukan secara rutin dan berkala?**

Berdasarkan pertanyaan tersebut jawaban yang didapat dari seluruh informan sependapat mengatakan, “ya”.(Hasil wawancara tanggal 28 Mei, 08 Juni dan tanggal 10 Juni 2015).

Berdasarkan jawaban dari seluruh informan diatas maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa, pengukuran dan pemantauan aspek-aspek dampak lingkungan operasional di PT.pertamina (Persero) TBBM Kijang dilakukan secara rutin dan berkala.

b. Apakah dilakukan secara serius dan sesuai dengan SOP?

Dari pertanyaan tersebut seluruh informan sependapat menjawab, “ya”. (Hasil wawancara tanggal 28 Mei, 08 Juni dan tanggal 10 Juni 2015).

Berdasarkan jawaban yang didapat dari seluruh informan diatas maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa, pengukuran dan pemantauan aspek-aspek dampak lingkungan operasional di PT.pertamina (Persero) TBBM Kijang dikerjakan berdasarkan SOP dan dilakukan secara serius, rutin dan berkala.

9. Pemakaian Alat Pelindung Diri (APD)

Untuk menganalisis pemakaian APD penulis mengacu pada teori Ramli (2010:105) yang

mengatakan bahwa, dalam konsep K3 penggunaan APD merupakan pilihan terakhir atau *last resort* dalam pencegahan kecelakaan. Hal ini disebabkan karena alat pelindung diri bukan untuk mencegah kecelakaan (*reduce likelihood*) namun hanya sekedar mengurangi efek atau keparahan kecelakaan (*reduce consequences*).Pertanyaan wawancara untuk mewakili indikator ini adalah:

a. Apakah bapak/ibu sudah mengerti dengan cara penggunaan peralatan *safety* yang telah tersedia di perusahaan ini?

Dari pertanyaan tersebut jawaban yang didapat dari seluruh informan mengatakan, “mengerti”. (Hasil wawancara tanggal 28 Mei, tanggal 08 Juni dan tanggal 10 Juni 2015).

Dari jawaban hasil wawancara tersebut penliti mengambil kesimpulan bahwa seluruh informan mengerti cara penggunaan peralatan *safety* yang telah tersedia di PT.Pertamina (Persero) TBBM Kijang.

b. Alat Pelindung Diri (APD) yang tersedia apakah masih layak untuk digunakan?

Dari pertanyaan diatas Jawaban yang didapat dari seluruh informan mengatakan, “masih layak”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka peneliti menyimpulkan bahwa Alat Pelindung Diri (APD) yang telah tersedia di PT.Pertamina (Persero) TBBM Kijang masih layak untuk digunakan.

10. Alat SMK3 yang tersedia

Untuk mengalisis alat SMK3 yang tersedia di PT.Pertamina (Persero) Terminal BBM Kijang maka peneliti mengacu pada ketentuan pasal 14C Undang-undang Keselamatan Kerja No.1 tahun 1970 (dalam Ramli, 2010:106), yang mengatakan bahwa pengusaha wajib menyediakan alat keselamatan kerja secara cuma-cuma sesuai dengan sifat bahayanya. Pertanyaan wawancara untuk mewakili indikator ini adalah:

a. Sudah cukupkah alat-alat SMK3 yang disediakan oleh pihak PT.Pertamina (Persero) TBBM Kijang?

Berdasarkan pertanyaan tersebut jawaban yang didapat dari Informan 1, 2 dan informan 3 mengatakan, “belum sepenuhnya mencukupi”. (Hasil wawancara tanggal 08 Juni dan 10 Juni 2015).

Berdasarkan jawaban dari informan 1, 2 dan informan 3 maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa, alat-alat SMK3 di PT.Pertamina

(Persero) TBBM Kijang belum sepenuhnya mencukupi.

Pendapat berbeda yang disampaikan oleh key informan yang mengatakan bahwa:

“Belum sepenuhnya mencukupi karena diharapkan selalu ada peningkatan yang lebih baik dan lebih canggih”. (Hasil wawancara 28 Mei 2015).

Berdasarkan jawaban dari key informan tersebut maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa peralatan SMK3 di PT.Pertamina (Persero) Terminal BBM Kijang belum sepenuhnya terpenuhi sesuai harapannya, karena beliau sangat mengharapkan selalu ada peningkatan yang lebih baik dan lebih canggih disesuaikan dengan perkembangan teknologi.

Mengacu pada teori maupun jawaban yang didapat dari seluruh informan tersebut maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa, penyediaan fasilitas yang memadai menjadi salah satu faktor pendorong untuk peningkatan produktivitas perusahaan khususnya fasilitas SMK3, sehingga dapat memotivasi pekerja untuk merasa lebih gairah dan semangat dalam melakukan tugas dan pekerjaannya. Fasilitas SMK3 adalah faktor utama yang sangat berpengaruh penting, sehingga pekerja merasa aman

dan nyaman pada saat bekerja. Penyediaan fasilitas SMK3 tersebut harus disesuaikan juga dengan kemajuan teknologi yang semakin mutakhir, karena inovasi baru yang lebih kreatif dan lebih praktis dalam penggunaannya sehingga menjadi penunjang untuk peningkatan produktivitas perusahaan, yang jelas harus berkualitas dan sesuai standar.

b. Apakah alat-alat SMK3 yang tersedia sudah sesuai standar nasional?

Berdasarkan pertanyaan tersebut jawaban yang didapat dari Informan 1, 2 dan informan 3 menjawab, “belum seluruhnya”. (Hasil wawancara tanggal 08 dan tanggal 10 Juni 2015).

Berdasarkan jawaban yang didapat dari informan 1, 2 dan informan 3 tersebut maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa, alat-alat SMK3 yang sudah tersedia di PT.Pertamina (Persero) Terminal BBM Kijang ternyata seluruhnya belum sesuai standar nasional.

Pendapat berbeda yang dikemukakan oleh Key informan yang mengatakan bahwa:

“Sudah, sebab peralatan yang tersedia dari produksinya sudah berstandar nasional (SNI)”. (Hasil wawancara 28 Mei 2015).

Berdasarkan jawaban yang dikemukakan oleh key informan tersebut maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa, peralatan yang telah tersedia dimiliki oleh PT.Pertamina (Persero) Terminal BBM Kijang telah dibeli atau diorder dari produksinya sudah berkualitas Standar Nasional Indonesia (SNI).

Berdasarkan jawaban yang dikemukakan oleh seluruh informan tersebut maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa peralatan SMK3 yang tersedia di PT.Pertamina (Persero) Terminal BBM Kijang sebenarnya sudah sesuai Standar Nasional Indonesia, namun jika dibandingkan dengan semua peralatan hasil produksi dari perusahaan-perusahaan dari negara asing tingkat Standar Nasional Indonesia masih kalah saing dalam pasar internasional jika ditinjau dari kualitas barang maupun harga jualnya.

11. Tingkat kepuasan karyawan akan pelaksanaan SMK3

Untuk menganalisis tingkat kepuasan karyawan akan pelaksanaan SMK3 penulis mengacu pada teori Soehatman Ramli (2010:25) yang mengatakan bahwa, tempat kerja yang baik adalah tempat kerja yang aman. Lingkungan kerja yang menyenangkan dan serasi akan mendukung tingkat keselamatan. Oleh karena itu kondisi K3 dalam perusahaan adalah cerminan dari kondisi ketenagakerjaan dalam

perusahaan. Jika kinerja SMK3 baik, dapat dipastikan bahwa kondisi ketenagakerjaan dalam perusahaan tersebut juga berjalan baik dan sebaliknya. Sistem pembinaan, pengawasan, kepedulian manajemen dan pengupahan yang baik akan mendorong meningkatnya kondisi keselamatan organisasi. Pertanyaan wawancara untuk mewakili indikator ini adalah:

a. Puaskah bapak/ibu dengan pelaksanaan SMK3 di perusahaan ini?

Dari pertanyaan tersebut jawaban yang didapat dari seluruh informan sependapat mengatakan, “puas”. (Hasil wawancara tanggal 28 Mei, 08 Juni dan 10 Juni 2015).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa seluruh informan merasa puas dengan pelaksanaan SMK3 di PT.Pertamina (Persero) TBBM Kijang.

b. Puaskah bapak/ibu dengan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja yang diberikan oleh PT.Pertamina (Persero) TBBM Kijang?

Berdasarkan pertanyaan tersebut jawaban yang didapat dari seluruh informan mengatakan bahwa, “sangat puas”. (Hasil wawancara

tanggal 28 Mei, 08 Juni dan tanggal 10 Juni 2015).

Berdasarkan jawaban hasil wawancara tersebut maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa para informan sangat puas terhadap jaminan keselamatan dan kesehatan kerja yang diberikan oleh PT.Pertamina (Persero) TBBM Kijang.

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Pada Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM Kijang. Berdasarkan hasil pengamatan dan jawaban hasil wawancara penelitian yang penulis lakukan dilapangan, untuk mengambil kesimpulan peneliti mengacu pada teori Firmanto,2013 yang mengatakan beberapa indikator SMK3 yang dapat digunakan sebagai berikut:

1. Kecelakaan Kerja.

Berdasarkan indikator tersebut, hasil wawancara dan pengamatan langsung peneliti mengambil kesimpulan bahwa, dalam 3 tahun terakhir bahkan sejak PT.Pertamina (Persero) Terminal BBM Kijang dibangun tidak pernah terjadi kecelakaan kerja di lokasi perusahaan.

2. Kasus Penyakit Akibat Kerja.

Dari jawaban hasil wawancara maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa, selama 3 tahun terakhir tidak pernah terjadi penyakit akibat kerja di

- PT.Pertamina (Persero) Terminal BBM Kijang.
3. Laporan Pelanggaran SMK3.
Dari jawaban seluruh informan maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa, dalam pembuatan laporan pelanggaran SMK3 di PT.Pertamina (Persero) Terminal BBM Kijang sudah sesuai berdasarkan SOP yang telah ditentukan. Tugas pembuatan laporan ini adalah manajemen para ahli *Safety* yang bekerja secara profesional berdasarkan temuan atau realita yang terjadi di lokasi perusahaan.
 4. Ketidaksesuaian Pelaksanaan SMK3.
Dari jawaban seluruh informan maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa, dalam pelaksanaan SMK3 di PT.Pertamina (Persero) Terminal BBM Kijang sudah sesuai dengan SOP yang ada.
 5. Penyelesaian Suatu Program Kerja.
Berdasarkan hasil wawancara maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa dalam penyelesaian suatu program kerja di PT.Pertamina (Persero) Terminal BBM Kijang dilakukan secara profesional dan berkelanjutan.
 6. Pelatihan yang Terlaksana.
Berdasarkan hasil wawancara maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa, semua informan pernah mengikuti pelatihan SMK3. Kegiatan pelaksanaan pelatihan SMK3 sangat penting dilakukan secara rutin bagi seluruh pekerja yang ada di PT.Pertamina (Persero) Terminal BBM Kijang, diguna dapat menambah wawasan, pengetahuan maupun pengalaman tentang SMK3 untuk dapat diterapkan pada saat bekerja di perusahaan untuk mengantisipasi dampak buruk akan terjadi pada para pekerja maupun perusahaan itu sendiri.
 7. Penyelesaian Tindakan Pengendalian Resiko.
Berdasarkan hasil wawancara maka peneliti menyimpulkan bahwa setiap pekerja yang tidak patuh dalam penggunaan APD pada saat bekerja harus ditegur dan diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku di perusahaan PT.Pertamina (Persero) Terminal BBM Kijang.
 8. Hasil Pengukuran Lingkungan Kerja.
Berdasarkan jawaban dari seluruh informan maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa, pengukuran dan pemantauan aspek-aspek dampak lingkungan operasional di PT.pertamina (Persero) Terminal BBM Kijang dilakukan secara rutin dan berkala, secara serius dan sesuai SOP.
 9. Pemakaian Alat Pelindung Diri.
Dari jawaban hasil wawancara peneliti mengambil kesimpulan bahwa seluruh informan mengerti cara penggunaan peralatan *safety* yang telah tersedia di PT.Pertamina (Persero) Terminal BBM Kijang.
 10. Alat SMK3 yang tersedia.
Berdasarkan jawaban yang dikemukakan oleh seluruh informan maka peneliti mengambil kesimpulan

bahwa peralatan SMK3 yang tersedia di PT.Pertamina (Persero) Terminal BBM Kijang sebenarnya sudah sesuai Standar Nasional Indonesia, namun jika dibandingkan dengan semua peralatan hasil produksi dari perusahaan-perusahaan dari negara asing tingkat Standar Nasional Indonesia masih kalah saing dalam pasar internasional jika ditinjau dari kualitas barang maupun harga jualnya.

11. Tingkat Kepuasan Karyawan akan Pelaksanaan.

Berdasarkan hasil wawancara maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa seluruh informan merasa puas dengan pelaksanaan SMK3 di PT.Pertamina (Persero) Terminal BBM Kijang.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka diajukan saran-saran sebagai pelengkap terhadap hasil penelitian yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Bagi peneliti keberhasilan atau prestasi dari PT.Pertamina (Persero) TBBM Kijang dalam mempertahankan *zero accident* saat ini masih belum sempurna, selanjutnya sangat diharapkan agar dalam masa yang akan datang dalam catatan atau data rekap *zero accident* oleh para manajemen perusahaan dalam setiap tahunnya harus dijadikan arsip yang menjadi dasar penghargaan (*awards*) yang mesti harus dilaporkan kepada PT.Pertamina

pusat maupun pemerintah setempat untuk dapat diketahui oleh instansi terkait dalam kesuksesan penerapan SMK3 yang telah dicapai. Hal ini dilakukan agar dapat meningkatkan hubungan perusahaan dan juga fungsi pengawasan maupun tanggung jawab dari instansi tersebut.

2. Menurut peneliti, pihak perusahaan harus menjaga dan meningkatkan lingkungan perusahaan yang sehat dan aman serta keselamatan dan kesehatan pekerjanya, karena bagaimanapun pekerja adalah asset utama perusahaan.
3. Menurut peneliti, para petugas *safety* dalam membuat laporan pelanggaran SMK3 agar harus dituntut profesionalitas dan penuh rasa tanggung jawab yang harus selalu ditingkatkan.
4. Bagaimanapun *Standard Operational Prosedure (SOP)* menjadi dasar untuk mencapai kesuksesan SMK3, maka harus dihindari adalah melaksanakan tugas atau pekerjaan tidak berdasarkan SOP, karena dapat berakibat fatal.
5. Dalam penyelesaian suatu program kerja harus dituntut profesionalitas, namun dituntut juga kreativitas yang harus dikembangkan dan ditingkatkan secara berkelanjutan.
6. Menurut peneliti pelatihan SMK3 yang dilaksanakan secara rutin dan berkala harus wajib dilaksanakan bagi seluruh pekerja yang ada di PT.Pertamina (Persero) Terminal BBM Kijang, guna mengantisipasi dampak buruk yang

- akan terjadi, dan dapat meningkatkan keamanan dan kemahiran bagi seluruh pekerja yang ada.
7. Pihak perusahaan harus tegas dalam memberikan sanksi bagi para pekerja yang melanggar aturan yang berlaku diperusahaan khususnya tentang SMK3, dan kewajiban setiap pekerja harus memberikan laporan yang cepat apabila menemukan tanda-tanda bahaya dilokasi PT.Pertamina (Persero) Terminal BBM Kijang maupun para rekan kerjanya yang melanggar peraturan perusahaan tentang SMK3.
 8. Pengukuran dan pemantauan aspek-aspek dampak lingkungan kerja sangat dibutuhkan ketelitian, keseriusan dan tanggung jawab yang tinggi, karena lingkungan kerja adalah salah satu faktor utama yang mempengaruhi kecelakaan kerja.
 9. Menurut peneliti penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) harus wajib dipahami penggunaannya pada saat memasuki lokasi perusahaan, maka APD juga harus dipastikan kelayakannya dan sesuai standar. Pihak perusahaan tegas dalam memberikan sanksi apabila para pekerja tidak patuh dalam penggunaan APD apabila masuk di lokasi perusahaan.
 10. Pihak perusahaan harus wajib mengontrol kelayakan peralatan SMK3 telah digunakan oleh para pekerjanya maupun yang telah tersedia diperusahaan untuk mengantisipasi dampak buruk yang akan terjadi.
 11. Pihak perusahaan maupun pekerja agar tidak saling merugikan utuk dapat mematuhi ketentuan maupun undang-undang yang berlaku tentang kewajiban dan hak perusahaan maupun pekerjanya, agar efektif dan efisien dalam penerapan SMK3 dan untuk meraih *zero accident* dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Soehatman Ramli. 2005. *Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja OHSAS 18001*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Indah Puji Hartantik. 2014. *Buku Praktis Mengembangkan SDM*. Yogyakarta: Laksana.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Soekidjo Notoatmodjo. 2003. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sedarmayanti. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung: Refika Aditama.

- CHR. Jimmy L. Gaol. 2014. *Human Capital, Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Grasindo.
- Husein Umar. 2001. *Riset Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Susilo Martoyo. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPF
- Gary Dessler. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Indeks Kelompok Gramedia.
- Robert L. Mathis – John H. Jackson. 2006. *Human Resource Management, Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Francesko Sofo. 2003. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Syafaruddin Alwi. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Strategi Keunggulan Kompetitif*. Yogyakarta: BPF.
- Suparno Eko Widodo. 2015. *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Vincent Gaspersz. 2007. *Organizational Excellence, Model Strategik Menuju World Class Quality Company*. Jakarta: Gramedia.
- International Labour Organization (ILO). 2013. *Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Sarana Untuk Produktivitas*. Jakarta: ILO
- Annasyiatul Uhd dkk. 2008. *Buku Pedoman Pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Untuk Praktek dan Pratikum*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- DOKUMEN DAN BACAAN LAINNYA**
- Peraturan Menteri No.05 pasal 1 Tahun 1996. Tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- Undang-undang No.1 Tahun 1970. Mengenai Keselamatan Kerja.
- Undang-Undang No.23 Tahun 1992. Tentang Kesehatan, menjelaskan bahwa setiap tempat kerja harus melaksanakan upaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- UU No.13 tahun 2003 Pasal 86 dan Pasal 87. Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Dan Wajib Penerapan SMK3 di Lingkungan Perusahaan.
- Peraturan Pemerintah RI No.50 Tahun 2012 Tentang Tujuan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

B. TESIS DAN SKRIPSI

Alfiandri. 2008; Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Motivasi Berprestasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru.

Hiksan Nur. 2012; Implementasi Program Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Terhadap Produktivitas Karyawan Pada PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM Makasar.

Fitrah Wahyudi Imam, 2013; Laporan Kerja Praktek Deskripsi Implementasi OHSAS 18000:2007 Pada Ssistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) PT. Indolakto Factory Jakarta.

(Berdasarkan Permenaker 05/MEN/1996), <<http://digilib.its.ac.id/public/ITS-Undergraduate-14893-presentationpdf.pdf>>

NRP Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Safety And Health Management System Plan (SMK3), (5 Agustus 2010), <<http://digilib.its.ac.id/public/ITS-Undergraduate-14893-presentationpdf.pdf>>.

Indikator Kinerja SMK3 Perusahaan, (15 Januari 2013) <<http://k3lengkap.blogspot.com/2013/01/indikator-kinerja-smk3-perusahaan.html>>.

C. Internet

Organisasi Keselamatan Kerja, (10 Mei 2012), <<https://roysarimilda.wordpress.com/tag/organisasi-kerja/>>

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerjadan Panitia Pembina Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Dunia Kerja, (20 Januari 2013), <<http://raiarsa.blogspot.com/2013/01/smk3-dan-p2k3.html>>

Perencanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) DI PPNS-ITS